

Analisis Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

Rahma Awaliyah

Jurusan Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

email: rahmaawaliyah28@gmail.com

Abstract

The balance sheet as one of the local government financial statements consisting of assets that describe the condition of economic wealth owned by the local government, but in the balance sheet of the local government of Tasikmalaya Regency there is a decrease in assets, namely current assets and other assets. The purpose of this study is to analyze assets on the balance sheet of the local government of Tasikmalaya Regency so that it can be seen how the financial condition of the Tasikmalaya Regency Government is, how is the ability of the Tasikmalaya Regency Government to fulfill its obligations, and the indicators behind the decline in assets by using financial ratios. which consists of the liquidity ratio and solvency ratio. The research method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. While the validity of the data is tested by using data triangulation. The results showed that the financial condition of the Tasikmalaya Regency Government was in prime condition and the Tasikmalaya Regency Regional Government was very good at fulfilling its obligations as seen from the results of the analysis of liquidity ratios and solvency ratios. The decline in asset value in 2020 at the Tasikmalaya Regency Government was influenced by a decrease in current assets due to a decrease in cash and a decrease in other assets due to asset write-offs.

Keywords: Assets, Liquidity, Solvency

Pendahuluan

Keuangan daerah adalah Amanah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan kepentingan keuangan pemerintahannya yang sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sehingga sebagai bentuk pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah dialokasikan, Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan.

Berkaitan dengan laporan keuangan, menurut (Bastian, 2010), laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan yang memberikan informasi keuangan Pemerintah Daerah secara terstruktur berdasarkan asas akuntabilitas serta transparansi. Sehingga dalam pengertian ini dapat dipahami bahwa laporan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran serta sebagai tuntutan mewujudkan pemerintahan yang *good governance* (Khafiyya, 2017). Dalam hal tanggungjawab pengelolaan sumber daya, Pemerintah Daerah perlu membuat laporan keuangan yang dibuat terstruktur dan sistematis seperti neraca laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai aset (Effendi, 2021).

Dalam laporan keuangan, terdapat komponen-komponen laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dan laporan Neraca. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor. 8 Tahun 2006 Pasal 1 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap

pos kewajiban serta aset yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu dua belas bulan setelah terjadinya pelaporan.

Neraca adalah bagian dari komponen laporan keuangan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomo. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. neraca sebagai bentuk pelaporan mengenai sejumlah informasi dan data perihal penggunaan, pengalokasian, dan sumber keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat. Serta bermanfaat bagi orang-orang yang berkepentingan dalam proses pembuatan keputusan baik pada bidang ekonomi, sosial, dan politik dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas (Ai Siti, 2019). Pengguna neraca sebagai salah satu laporan keuangan yaitu masyarakat, DPR/ DPD dan manajemen dalam pemerintah (Zamzami, 2014). Dalam penggunaannya, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka neraca perlu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku (Veren Virginia, 2018).

Menurut Standar Peraturan Pemerintah N0.71 Tahun 2010, aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset dibagi kedalam dua bagian, pertama aset lancar yang dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan dan terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, serta persediaan. Kedua aset non lancar yang merupakan aset yang bersifat jangka panjang untuk kegiatan pemerintah dan terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Adapun aset pemerintah daerah adalah salah satu komponen dari neraca yang memberikan informasi mengenai kondisi kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Salah satu daerah otonom di Jawa Barat yaitu Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, merupakan kabupaten yang paling berperan penting dan paling besar diwilayah priangan timur dengan luas wilayah sebesar 2.708,82 Km² terdiri dari 39 kecamatan dan 351 Desa, dalam rangka menjalankan UU (Undang-Undang) Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya membuat laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan kepada publik yaitu neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat secara profesional dan kredibel mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor. 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) pasal 91, kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk disampaikan kepada pengguna barang. Aset atau barang milik daerah memiliki nilai yang kompleks serta signifikan. Sehingga penyajian, pengungkapan, penilaian aset atau barang milik daerah menjadi fokus utama dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk disampaikan kepada publik. Pengelolaan aset daerah dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan sampai kepada tahap penghapusan aset daerah (Suparman, 2018).

Dalam laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, terdapat aset Pemerintah Daerah yang menyediakan informasi mengenai potensi dan sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai alat pengendali dari evaluasi kinerja Pemerintah Daerah (Samuel, 2019). Kinerja pemerintah lokal merupakan indikator penting terhadap kemajuan bagi pencapaian misi organisasi publik secara keseluruhan, dan dapat dipandang sebagai ukuran internal bagi upaya-upaya dan pencapaian pelayanan pada masyarakat. Sebagai pembaca laporan keuangan, masyarakat pada umumnya

dan pemangku kebijakan pada khususnya dapat mengetahui keadaan riil laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari aset tetap, aset lancar, investasi jangka panjang, aset lainnya, serta jumlah keseluruhan aset yang dimiliki.

Terdapat penurunan nilai aset pada komponen aset dalam laporan neraca keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1

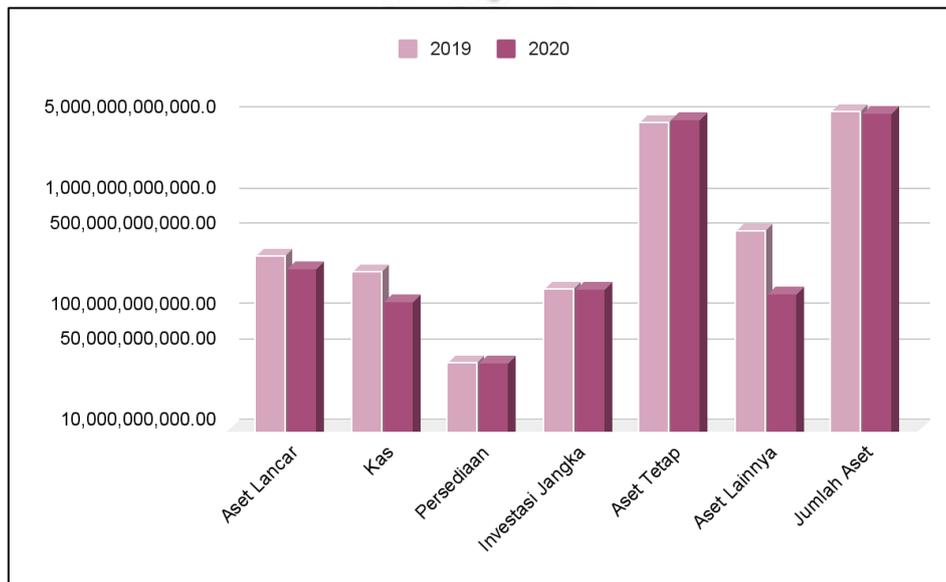
Pertumbuhan Aset pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Nama Akun | 2019 | 2020 | Pertumbuhan |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Aset Lancar | Rp 294.399.113.620,46 | Rp 230.822.094.530,77 | -21 % |
| Kas | Rp 217.446.397.269,18 | Rp 120.683.063.119,96 | -0,44 % |
| Persediaan | Rp 35.311.386.674,10 | Rp 35.233.161.557,90 | -0.002% |
| Investasi Jangka Panjang | Rp 152.068.371.997,75 | Rp 152.160.484.885,94 | 0,06 % |
| Aset Tetap | Rp 4.261.024.924.507,03 | Rp 4.541.739.966.349,38 | 7 % |
| Aset Lainnya | Rp 483.883.811.196,20 | Rp 142.163.008.745,10 | -71% |
| Jumlah Aset | Rp 5.191.376.221.321,44 | Rp 5.066.885.554.511,19 | -2 % |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Gambar 1.1

Pertumbuhan Aset per Akun pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020



(Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021))

Dapat dilihat perbandingan pertumbuhan jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2019 dan 2020 dari table 1.1 dan gambar 1.1. Dimana pertumbuhan aset tetap hanya mencapai 7 %, investasi jangka panjang mengalami pertumbuhan sebesar 0,06 %, dan pada aset-aset lainnya tidak terjadi pertumbuhan aset karena nilainya negatif. Seperti aser

lancar (-21%), aset lainnya (-71%), dan jumlah total aset (-2%). Selain permasalahan tersebut diatas mengenai pertumbuhan nilai aset, terdapat permasalahan dalam proporsi nilai aset dalam neraca terhadap total nilai keseluruhan jumlah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2

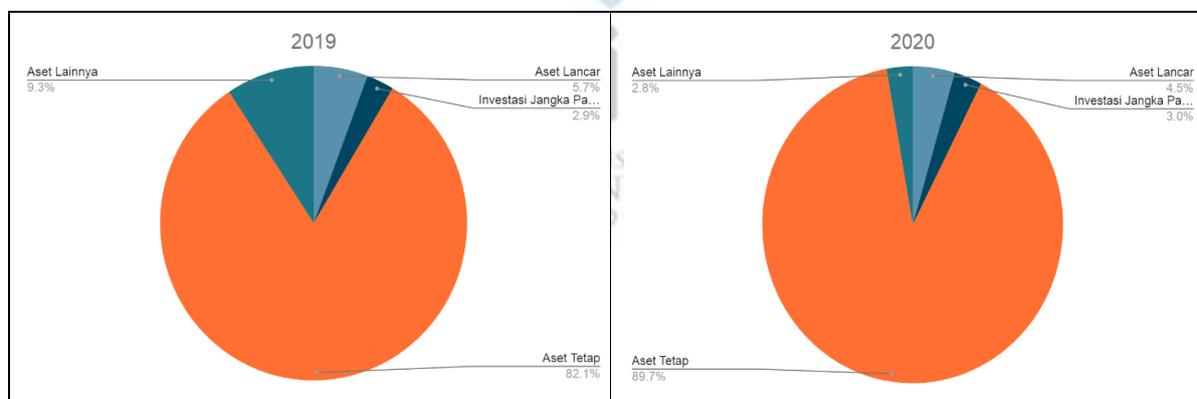
Proporsi Aset terhadap Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Nama Akun | 2019 | % dari Total Aset | 2020 | % dari Total Aset |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Aset Lancar | Rp 294.399.113.620,46 | 5.7 % | Rp 230.822.094.530,77 | 4.5 % |
| Kas | Rp 217.446.397.269,18 | 0.04 % | Rp 120.683.063.119,96 | 0.02 |
| Persediaan | Rp 35.311.386.674,10 | 0.007% | Rp 35.233.161.557,90 | 0.007 |
| Investasi Jangka Panjang | Rp 152.068.371.997,75 | 2.9 % | Rp 152.160.484.885,94 | 3 % |
| Aset Tetap | Rp 4.261.024.924.507,03 | 82.1 % | Rp 4.541.739.966.349,38 | 89.6 % |
| Aset Lainnya | Rp 483.883.811.196,20 | 9.3 % | Rp 142.163.008.745,10 | 2.8 % |
| Jumlah Aset | Rp 5.191.376.221.322,44 | | Rp 5.066.885.554.513,19 | |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Gambar 1.2

Proporsi Aset terhadap Total Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020



(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.2 serta gambar 1.2, dapat diketahui terjadi perubahan proporsi aset terhadap total jumlah aset. Terjadi kenaikan proporsi pada investasi jangka panjang sebesar 0,1 % yaitu pada tahun 2019 sebesar 2,9%, sedangkan pada tahun 2020 3%. Selain itu, terjadi kenaikan proporsi pada aset tetap sebesar 7,5 % yaitu pada tahun 2019 82,1 %, sedangkan pada tahun 2020 89,6 %. Namun terjadi penurunan proporsi pada aset lancar sebesar -1,2 % yaitu pada tahun 2019 5,7 %, sedangkan pada tahun 2020 4,5 %. Selain itu, terjadi penurunan proporsi pada aset lainnya sebesar -6,5 % yaitu pada tahun 2019 9,3 %, sedangkan pada tahun 2020 2,8 %.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, penurunan nilai aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya selama pandemi covid-19 mengalami penurunan atau dibatasi sehingga mempengaruhi nilai aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, penurunan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan adanya koreksi dan mutasi aset.

Dikarenakan adanya penurunan aset pada neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan analisis dengan analisis rasio keuangan pada neraca yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya (Anshori, 2019). Analisis neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan menggunakan rasio keuangan likuiditas dan solvabilitas dapat mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana untuk pembangunan daerah (Triatmanto, 2021). Informasi aset dalam neraca laporan keuangan sangat relevan apabila dilakukan analisis dengan rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas dan rasio likuiditas, karena dalam laporan keuangan pemerintah tidak berorientasi pada *profit* (Fathiyah, 2017).

Menurut (Mahmudi, 2019), analisis laporan keuangan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari komponen laporan keuangan yaitu dua angka atau lebih untuk menyajikan kemajuan kinerja dari satu tahun ke tahun berikutnya. Membandingkan laporan keuangan yang berupa neraca keuangan dua periode atau lebih bermanfaat untuk mengetahui penurunan dan kenaikan jumlah *persentase absolut* (dalam rupiah). Neraca keuangan dianalisis dengan rasio keuangan, dengan perhitungan dimana jumlah rupiah tahun mendasar atau tahun sebelumnya dibagi (Jumingan, 2014).

Penurunan nilai aset Pemerintah Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020 dianalisis dengan menggunakan teknik analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dari (Mahmudi, 2019), dengan rasio berikut:

1. Rasio Likuiditas

Menurut (Mahmudi, 2019), rasio ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah mengenai kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk melakukan analisis rasio likuiditas, yaitu:

a. Rasio Lancar

Rasio lancar disebut sebagai ukuran standar yang digunakan untuk menilai kesehatan Pemerintah Daerah sehingga dapat menunjukkan kecukupan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk melunasi utangnya. Nilai standar rasio lancar adalah 2:1 dengan nilai standar rasio yang dapat diterima yaitu 1:1.

b. Rasio Kas

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban melunasi utang dengan kas dan efek (investasi jangka pendek) secara segera, nilai standar minimal rasio kas adalah 1:1 (Kasmir, 2014). Kewajiban merupakan utang dari kejadian dimasa lalu dan penyelesaiannya menyebabkan sumber daya ekonomi pemerintah keluar (Djanegara, 2017).

c. Rasio Cepat

Rasio cepat merupakan rasio keuangan yang menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibannya dengan cepat. Standar nilai rasio lancar yaitu 1:1 (Kasmir, 2014).

2. Rasio Solvabilitas

Berdasarkan pendapat dari (Mahmudi, 2019), rasio solvabilitas bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencukupi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Nilai standar rasio solvabilitas adalah 2:1.

Peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh (Meigisanda, 2017), Trias Saraswati dan Satrijo Budwibow dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Menyusun Neraca pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Madiun” sebagai referensi dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis perlakuan asal jumlah aset dalam neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengan metode penelitian kualitatif deskriptif komparatif, adapun sampel diperoleh menggunakan teknik *purposive* dan *snowball*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyusun neraca Pemerintahan Kabupaten Madiun, perlakuan aset tetapnya dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sesuai dengan PP Nomor.71 Tahun 2020 tentang SAP serta terdapat LHP mengenai laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun.

Selain itu, peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan oleh Santi Nurpadilah dengan judul “Analisis Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Method*) pada Aset Tetap di Kantor Kementerian Agama Kota Bandung” sebagai referensi penelitian dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah perhitungan penyusutan aset tetap pada kantor Kementerian Agama Kota Bandung dengan menggunakan teknis analisis metode saldo menurun ganda sesuai PP Nomor.71 Tahun 2020 dengan PSAP Nomor. 7. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dengan metode kualitatif verifikatif menunjukkan bahwa penyusutan dengan metode saldo menurun ganda biaya penyusutan sebesar Rp. 4.386.600,00 dengan total akumulasi penyusutan sebesar Rp. 20.886.242,35. Adapun nilai Buku senilai Rp. 3.741.757.65, sehingga terlihat bahwa total biaya penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda semakin berkurang.

Selanjutnya, yang membedakan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu atau *novelty* adalah bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis rasio keuangan yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi dengan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, penulis melakukan analisis terhadap aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sehingga hasil akhir dalam penelitian yang penulis lakukan menghasilkan analisis mengenai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan teori yang digunakan.

Berdasarkan permasalahan mengenai penurunan nilai aset tetap, aset lancar, serta jumlah keseluruhan aset secara signifikan pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat ditarik rumusan masalah yaitu bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi seluruh kewajibannya dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis mengenai kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi seluruh kewajibannya dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Maka penulis tertarik untuk meneliti menggunakan teknis analisis rasio keuangan dengan judul “**Analisis Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020**”.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dari Miles dan Huberman, metode ini digunakan peneliti karena metode tersebut selaras serta relevan dengan masalah dan tujuan penelitian dengan memberikan deskripsi atas kejadian yang terjadi secara mendalam, komprehensif dan aktual mengenai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, studi literatur, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada kepala bidang akuntansi dan pelaporan, dan kepada kepala sub bidang perencanaan dan analisis kebutuhan aset pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Informan ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling* karena informan yang diteliti merupakan pihak-pihak yang mempunyai informasi detail dan teknis mengenai hal yang diteliti, berikut merupakan tabel data informan yang penulis lakukan wawancara:

Tabel 2.1

Data Informan

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|---|
| 1 | AYH | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya |
| 2 | AS | Perencana dan analisis kebutuhan aset pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya |

Sumber: Diolah peneliti, 2021.

Selanjutnya observasi dilakukan dengan mengunjungi kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan studi literatur dilakukan dengan melakukan telaah terhadap referensi-referensi pada jurnal-jurnal, studi pustaka, internet, dan buku-buku. Adapun sampel yang peneliti gunakan adalah *sampling purposive*, dengan tujuan untuk memenuhi kriteria tertentu dan untuk mengambil sampel dengan ketentuan tertentu. Neraca laporan keuangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020 dijadikan sampel dalam penelitian ini dan analisis rasio keuangan dari Mahmudi yaitu analisis rasio likuiditas serta rasio solvabilitas merupakan teknis analisis data atau teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini karena teori tersebut relevan dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian peneliti melakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil dan Pembahasan

Analisis aset dengan melakukan analisis rasio keuangan pada neraca Kabupaten Tasikmalaya merupakan penelitian yang bertujuan menilai dan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengenai bagaimana kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek periode anggaran 2019-2020. Teori yang penulis gunakan dalam melakukan analisis rasio keuangan pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019) yakni rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

Adapun hasil dari analisis aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020 dilihat dari rasio keuangan, sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Terdapat tiga macam rasio dalam rasio likuiditas, yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar digunakan untuk menilai kesehatan keuangan Pemerintah Daerah dengan melakukan perbandingan antara utang lancar dengan aktiva lancar yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tanggal neraca. Rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio Lancar = \frac{Aktiva Lancar}{Utang Lancar}$$

Rasio lancar menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melunasi utangnya dengan aset yang dimiliki.

Tabel 3.1
Hasil Perhitungan Rasio Lancar Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

| Tahun | Aktiva Lancar | Utang Lancar | Rasio Lancar |
|-------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2019 | Rp 294.399.113.620,46 | Rp 29.272.265.496,59 | 10.06 |
| 2020 | Rp 230.822.094.530,77 | Rp 41.497.714.058,74 | 5.56 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, perbandingan aktiva lancar dan utang lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 yaitu 10.06 : 1 yang berarti setiap 10.06 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Sedangkan pada tahun 2020 perbandingannya menurun yaitu diangka 5.56 : 1, dimana 5.59 rupiah aktiva lancar dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Hasil analisis rasio lancar pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dalam keadaan sangat wajar sejalan dengan nilai standar rasio yang dianggap wajar adalah 2:1 dan minimal 1 : 1 (Mahmudi, 2019). Sehingga hasil nilai analisis rasio lancar tersebut menunjukkan kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sangat baik dan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat melunasi utang jangka pendeknya dengan aset yang dimiliki.

Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kondisi Kesehatan keuangan tinggi, rata-rata memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi pula yang diwakili dengan tingkat PDRB perkapita masing-masing daerah (Hastaningrum, 2016). Aset yang dimiliki menghasilkan informasi yang yang andal, meningkatkan fungsi dan peran pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada publik, serta menjadi modal bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuannya, maka aset perlu dikelola dengan baik (Monika Sutri, 2015).

Aset yang andal adalah aset yang telah berpindah penguasaannya, diserahkan atau diterima hak kepemilikannya. Selain itu, aset tetap diakui jika serah terima aset tetap kepada pihak Pemerintah Daerah yang diperoleh dari pejabat yang berwenang sudah dibuat dalam bentuk berita acara (Shella, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam menulasi utangnya memiliki aset yang mencukupi baik dengan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Aset lancar merupakan aset yang sifatnya operasional dan rutin atau dengan aset lancar (Prihadi, 2019).

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, kondisi dan kelengkapan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya setelah terjadi penurunan nilai aset dalam neraca yang diakibatkan salah satunya karena penyusutan, tetapi tetap dalam kondisi baik. Baik dalam aset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan bangunan. Walaupun terkadang terdapat aset tetap yang berupa tanah yang bermasalah dalam kepemilikannya.

2. Rasio Kas

Rasio kas melakukan perbandingan antara utang lancar dengan kas yang tersedia dalam Pemerintah Daerah ditambah efek (investasi jangka pendek) yang segera dapat diuangkan. Rasio kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019-2020 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Rasio\ Kas = \frac{Kas + Efek}{Utang\ Lancar}$$

Rasio kas digunakan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya yang segera harus dilunasi dengan efek (investasi jangka pendek) dan kas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hasil perhitungan analisis rasio kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Hasil Perhitungan Rasio Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Tahun | Kas | Investasi Jangka Pendek | Utang Lancar | Rasio Kas |
|-------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 2019 | Rp 217.446.397.269,18 | Rp - | Rp 29.272.265.496,59 | 7.42 |
| 2020 | Rp 120.683.063.119,96 | Rp - | Rp 41.497.714.058,74 | 2.91 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 3.2 yang merupakan hasil perhitungan analisis rasio kas, perbandingan antara efek (investasi jangka pendek) dan kas dengan utang lancar pada tahun 2019 bernilai 7.42 rupiah. Sedangkan pada perbandingan antara utang lancar dengan investasi jangka pendek dan kas pada tahun 2020 adalah 2.91 rupiah. Ini berarti, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadikan akun kas dalam membayar utang yang harus dipenuhi, sehingga kesehatan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilihat dengan rasio kas dalam kondisi wajar sesuai dengan nilai standar rasio kas yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019) minimal 1:1.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat memenuhi kewajibannya yang segera harus dipenuhi dengan kas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kas yang mencukupi untuk memenuhi

kewajibannya dengan segera baik kas di daerah, kas dibendahara penerimaan, kas di BLUD, dan kas lainnya.

3. Rasio Cepat

Rasio cepat melakukan perbandingan antara utang lancar dengan aktiva lancar setelah dikurangi persediaan. Rasio cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2020 dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

Dengan melakukan analisis rasio cepat, dapat diketahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat membayar utangnya dengan cepat. Hasil perhitungan rasio cepat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Hasil Perhitungan Rasio Cepat Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Tahun | Aktiva Lancar | Persediaan | Utang Lancar | Rasio Cepat |
|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2019 | Rp 294.399.113.620,46 | Rp 35.311.386.674,10 | Rp 29.272.265.496,59 | 8.85 |
| 2020 | Rp 230.822.094.530,77 | Rp 35.233.161.557,90 | Rp 41.497.714.058,74 | 4.71 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, rasio cepat pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 sebesar 8.85:1. Yang berarti setiap 8.85 rupiah aktiva lancar setelah dikurangi dengan persediaan dapat menjamin 1 rupiah utang lancar, sedangkan pada tahun 2020, perbandingannya 4.71:1 yang berarti setiap 4.71 rupiah aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dapat menjamin 1 rupiah utang lancar. Hasil rasio cepat pada tabel 3.3 diatas mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dengan cepat melunasi utangnya karena melihat hasil perhitungan rasio cepat melebihi nilai standar 1:1 yang dikemukakan oleh (Mahmudi, 2019). Dengan demikian, kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinilai sangat likuid dalam memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat membayar utangnya dengan cepat, karena seluruh kewajiban kredit Pemerintah Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran yang bersangkutan.

Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari tabel hasil analisis rasio likuiditas berikut:

Tabel 3.5
Tabel Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

| Rasio Likuiditas | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
|------------------|------------|------------|
| Rasio Lancar | 10.06 | 5.56 |
| Rasio Kas | 7.42 | 2.91 |
| Rasio Cepat | 8.85 | 4.71 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 3.5, diatas, apabila dibandingkan rasio likuiditas tahun 2019 lebih likuid dibanding tahun 2020, tetapi nilai rasio likuiditas tahun 2020 memehuni standar nilai rasio keberhasilan. Perbandingan rasio likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1
Perbandingan Rasio Likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020



(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Rasio likuiditas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2019-2020 pada diagram diatas dalam kondisi prima. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendeknya dan nilai hasil analisisnya sudah memenuhi standar nilai rasio keberhasilan yang ditetapkan oleh Mahmudi. Hal ini diindikasikan oleh rasio lancar di tahun 2019 yaitu 10.06, sedangkan ditahun 2020 yaitu 5.56, rasio kas pada di tahun 2019 yaitu 7.42 sedangkan ditahun 2020 2.91 dan rasio cepat pada tahun 2019 yaitu 8.85, sedangkan rasio cepat pada 2020 yaitu 4.71 . Menurut (Mahmudi, 2019), rasio cepat adalah ukuran terbaik dalam melakukan analisis rasio keuangan karena dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi utangnya. Dengan hasil analisis tersebut, kondisi kesehatan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dinilai sangat likuid.

Pemerintah Daerah yang bisa memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu, berarti keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah likuid. Yaitu Pemerintah yang memiliki utang lancar lebih sedikit dari aktiva lancar (Tri, 2015). Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, utang lancar yang dimiliki lebih sedikit dari aktiva lancar. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat dinyatakan memiliki kondisi keuangan yang likuid.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio likuiditas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, salah satu pegawai di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketersediaan dana likuid sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak mengalami penundaan terhadap pemenuhan kewajiban.

b. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2020 dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Utang}}$$

Rasio solvabilitas dianalisis dengan tujuan mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Hasil perhitungan rasio solvabilitas dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6
Hasil Perhitungan Rasio Solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020

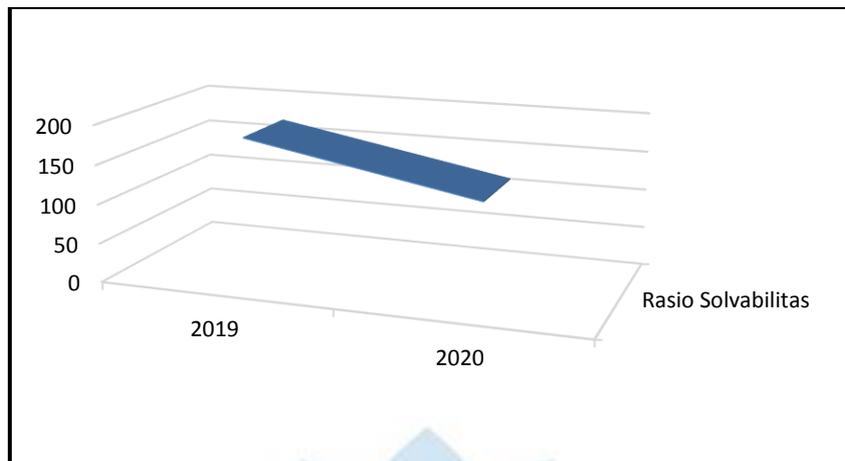
| Tahun | Total Aktiva | Utang Lancar | Rasio Solvabilitas |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 2019 | Rp 5.191.376.221.321,44 | Rp 29.272.265.496,59 | 177.34 |
| 2020 | Rp 5.066.885.554.511,19 | Rp 41.497.714.058,74 | 122.10 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 3.6, perbandingan total utang dengan total aktiva pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 yaitu 177.34:1. Berarti, 177.34 rupiah total aktiva yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menjamin 1 rupiah seluruh kewajiban. Sedangkan perbandingan rasio solvabilitas ditahun 2020 adalah 122.10:1, berarti 122.10 rupiah total aktiva yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat menjamin 1 rupiah seluruh kewajiban. Berikut gambar rasio solvabilitasnya:

Gambar 3.2

Gambar Rasio Solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019-2020



(Sumber: Data diolah peneliti, 2021)

Pada gambar 3.2, menggambarkan penurunan jaminan dari rasio solvabilitas yang dapat dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi seluruh kewajiban. Tahun 2019 rasio solvabilitas pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya bernilai 177.34 dan turun di tahun 2020 menjadi 122.10. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya penurunan nominal total aktiva yang semula pada tahun 2019 sebesar Rp 5.191.376.221.321,44 menjadi Rp 5.066.885.554.511,19 pada tahun 2020.

Penurunan rasio solvabilitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengelolaan yang baik terhadap aset lancar, karena aset lancar yang tidak terpakai telah dioptimalkan penggunaannya untuk melaksanakan pembangunan daerah dan memberikan pelayanan kepada publik. Penurunan ini tidak mengarah pada resiko solvabel dan apabila melihat perbandingan rasio solvabilitas dari tahun 2019 terhadap tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup wajar. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinilai solvabel dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat memenuhi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek, karena perbandingan rasio mencapai angka standar keberhasilan yang menurut (Mahmudi, 2019) yaitu sebesar 2:1.

Apabila Pemerintah Daerah memiliki aset yang mencukupi yang didanai dari investasi, sumber daya sendiri, dan ekuitas. Maka Pemerintah Daerah dapat memenuhi seluruh kewajibannya (Priyono, 2018). Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki sumber daya dan ekuitas investasi yang mencukupi untuk pemenuhan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek.

Berdasarkan hasil wawancara di kantor BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, serta termasuk kedalam daerah mandiri yang tidak memiliki ketergantungan dengan sumber dana eksternal. Sumber dana eksternal adalah pinjaman yang harus diperhitungkan selain utang pajak pusat, DAU (Dana Alokasi Umum), dan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), karena kedua jenis utang tersebut bukan merupakan sumber pendanaan pada pemerintah daerah (Hadi, 2015).

Indikator yang menyebabkan terjadinya penurunan aset yang signifikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2020 sebagaimana tabel 1.1, yaitu pada aset lancar terjadi penurunan 21% dari tahun 2019, pada aset lainnya terjadi penurunan 71% dari tahun 2019, serta nilai jumlah aset terjadi penurunan 2 % dari tahun sebelumnya, adalah sebagai berikut:

Pertama, penurunan aset lancar sebesar 21% pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dipengaruhi oleh penurunan nilai kas pada neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Menurut kepala bidang akuntansi dan pelaporan pada BKPAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tasikmalaya, penurunan nilai kas ini disebabkan oleh kelalaian bendahara, terdapat kas dibendahara yang belum disetorkan ke rekening kas daerah. Adapun saldo kas per-31 Desember 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Penurunan Kas pada Aset Lancar Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Uraian | 2019 | 2020 | Penurunan (%) |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Kas di Kas Daerah | 181.566.593.474,00 | 101.515.473.396,00 | 44 % |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 29.860.488,00 | 1.850.647,00 | 94 % |
| Kas di BLUD | 11.981.812.075,00 | 10.463.993.913,78 | 13 % |
| Kas di Bendahara FKTP | 5.794.476.075,00 | 2.912.709.073,00 | 50 % |
| Kas di Bendahara BOS | 15.767.620.097,18 | 2.871.573.599,18 | 82 % |
| Kas Lainnya | 2.306.035.063,00 | 2.917.462.491,00 | (+27 %) |
| Jumlah Kas | 217.446.397.269,18 | 120.683.063.119,96 | 82 % |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Pada uraian tabel 3.7 saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.120.683.063.119,96 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 96.763.334.149,22 dari tahun 2019 yang memiliki saldo kas sebesar Rp. 217.446.397.269,18. Oleh karena itu, hal tersebut yang menjadi indikator terjadinya penurunan aset lancar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

kedua, penurunan pada aset lainnya sebesar 71%. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8

Penurunan Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019-2020

| Uraian | 2019 | 2020 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | 337.331.714,35 | 415.056.714,35 |
| Aset Tidak Berwujud | 11.699.114.860,75 | 4.767.116.967,75 |
| Aset Lain-Lain | 471.847.364.621,10 | 136.980.835.063,00 |
| Jumlah Aset Lainnya | 483.883.811.196,20 | 142.163.008.745,10 |

Sumber: Neraca Kabupaten Tasikmalaya (Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah aset lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Menurut kepala bidang akuntansi dan pelaporan pada BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dearah)

Kabupaten Tasikmalaya, penurunan nilai aset lainnya ini dipengaruhi oleh berpindahnya kembali aset lainnya menjadi aset tetap sesuai dengan nilai tercatatnya, serta terjadinya penghapusan aset karena kerusakan aset. Baik rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

Aset yang dieliminasi atau terjadinya penghapusan aset, boleh dilakukan apabila aset sudah tidak mempunyai manfaat ekonomi dimasa depan serta apabila aset dihentikan secara permanen (Yefta, 2015). Apabila aset sudah berubah statusnya baik karena berubah status hukum kepemilikan karena pemusnahan, atau karena dijual, maka pejabat yang berwenang harus menerbitkan surat keputusan penghapusan barang dari daftar barang dengan tujuan untuk mengoptimalkan aset agar tidak terus dicatat dalam buku inventaris barang (Hadinur Rahman, 2020). Hasil analisis rasio keuangan berguna bagi pihak pemerintah sendiri, karena hasil analisis rasio keuangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi pengembangan kinerja pemerintah dan menentukan rencana anggaran tahun kedepan (Nandang, 2020).

Simpulan

Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek dilihat dari rasio likuiditas dan rasio solvabilitas adalah dalam keadaan prima dan memenuhi standar nilai keberhasilan, Kabupaten Tasikmalaya dapat memenuhi seluruh kewajibannya dengan cepat baik dengan aset yang mencukupi dan dengan kas. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki hasil nilai analisis rasio yang sangat baik antara perbandingan aset dengan kewajibannya sejalan dengan standar rasio yang dianggap wajar. Penurunan nilai aset pada neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019-2020 yaitu pada aset lancar sebesar 21% dipengaruhi oleh penurunan kas karena kelalaian bendahara yang belum menyetorkan kas ke rekening kas daerah. Selain itu, penurunan aset pada neraca laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya lainnya yaitu pada aset lainnya sebesar 71% dipengaruhi oleh terjadinya kerusakan aset, yaitu kerusakan aset ringan, sedang, serta berat sehingga dilakukan penghapusan dan terjadi perpindahan kembali aset lainnya ke aset tetap.

Referensi

- Ai Siti, R. F. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 107-124. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id> pada 24 Agustus 2021.
- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 1114. diakses dari <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/248> pada 09 Desember 2021.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Pektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Djanegara, M. S. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori, Praktik, dan Permasalahan)*. Bogor: Kesatuan Press.

- Effendi, S. (2021). *Akuntansi Keuangan SKPD/SKPKD (PPKD) Pemerintah Daerah*. Batam: CV Batam Publisher.
- Fathiyah. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Sesudah diterapkannya Basis Akruial Tahun 2014-2015. *Journal of Economics and Business*, 74. Diakses dari <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/8> pada 20 Desember 2021.
- Hadi, W. (2015). Pengaruh Likuiditas dan Reverage terhadap Kemandirian Daerah (Studi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*. Diakses dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/TRA/article/view/327> pada tanggal 31 Desember 2021.
- Hadinur Rahman, M. H. (2020). Pengelolaan Aset Daerah dalam Rangka Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 124-130. Diakses dari <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7939> pada 20 Desember 2021.
- Hastaningrum, S. (2016). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Se-Jawa Tahun 2011-2015. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 8. Diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/abis/article/view/59321> pada 07 Januari 2022
- Jumingan. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Khafiyya, N. (2017). Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 1. Diakses dari <http://ejournal.untagsmd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2522> pada 20 Desember 2021.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Meigisanda, S. t. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Menyusun Neraca pada Pemerintah Kabupaten Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 153-168. Diakses dari <http://e-journal.unipma.ac.id> pada 23 September 2021.
- Monika Sutri, V. I. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *EMBA*, 818-830. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7556> pada 07 Januari 2022
- Nandang, G. E. (2020). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insatansi Pemerintah.

- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Priyono, C. (2018). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Tahun 2011 S.D 2015. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* , 1-34. Diakses dari <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59246> pada 10 Januari 2022
- Samuel, F. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shella, R. A. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 40-43.
- Suparman, N. (2018). Pengelolaan Aset Daerah dalam Mewujudkan Tertib Administrasi pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku. *Jurnal Ilmu Sosial*, 74-97. Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id> pada 24 September 2021.
- Tri, B. (2015). *Analisis Rasio Keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan pada KPRI Bina Sejahtera SETDA Kabupaten Semarang*. Retrieved from UNNES Repository. Diakses dari <http://lib.unnes.ac.id/22587/> pada 07 Januari 2022.
- Triatmanto, B. (2021). *Menggagas Percepatan Pencepatan Sustainability Development Goal's (SDG's)*. Malang: Selaras Media Kresindo.
- Undang-Undang N0mor 1 tahun 2004
- Veren Virginia, R. K. (2018, Desember 02). Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 97. Retrieved from Jurnal Pemikiran Administrasi Negara: Diakses dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7629/3770> pada 02 Desember 2021
- Yefta, V. S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. *Riset Akuntansi*, 45-55. Diakses dari <https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=id&u=https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/8444&prev=search&pto=aue> pada 07 Januari 2022
- Zamzami, F. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.